



## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: -, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Manado, 28 Oktober 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -, Kabupaten Minahasa, dengan domisili elektronik pada alamat email: - sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano secara elektronik pada tanggal 04 Juli 2024 dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **AYAH ANAK** sejak tahun 2015 sudah tidak tahu lagi keberadaanya sampai saat ini;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama :
  - **ANAK**, tempat tanggal lahir di Langowan, 3 Desember 2005, berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan alamat di - Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah

Halaman 1 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyelesaikan sekolah sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja;

3. Bahwa calon mempelai pria yang bernama :
  - **CALON SUAMI**, tempat tanggal Lahir di Binjeita, 1 Desember 2003, berumur 21 (dua puluh satu) tahun, alamat di - Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Bahwa calon mempelai pria telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Toko, dengan penghasilan perdua bulan kurang lebih Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa calon mempelai pria merupakan anak dari **AYAH CALON SUAMI**, tempat dan tanggal lahir Tomohon, 30 Mei 1964, NIK -, umur 60 tahun, agama Katholik, pekerjaan montir, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di - Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara dan **IBU CALON SUAMI**, tempat dan tanggal lahir Binjeita, 28 Oktober 1982, NIK 7171093005640001, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di - Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bahwa calon mempelai pria **CALON SUAMI** saat ini telah memeluk agama Islam pada tanggal 22 Juni 2024, sesuai dengan surat pernyataan memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Imam Masjid Baiturrahman Langowan;
6. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan saat ini telah hamil dengan usia kandungan 13-14 minggu, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon berserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
7. Bahwa calon mempelai wanita **ANAK** telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
8. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **ANAK** dengan **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langowan mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Surat penolakan atas nama **ANAK** yaitu calon mempelai wanita (berumur 17 tahun) dengan nomor surat : B.79/KUA.23.03/PW.01/VII/2024;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

9. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **ANAK** dan **CALON SUAMI** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon mempelai wanita saat ini telah mengandung dengan usia kandungan 13-14 minggu hasil hubungan dengan **CALON SUAMI**;
10. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
11. Bahwa antara calon mempelai yaitu **ANAK** dan **CALON SUAMI** tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
12. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah siap membimbing serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita;
13. Bahwa para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama **ANAK** yang berumur 18 tahun dengan calon mempelai pria **CALON SUAMI** yang berumur 21 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **ANAK**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 18 tahun 7 bulan 8 hari;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** sering bertemu dan merasa cocok;

Halaman 4 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **CALON SUAMI** sudah sangat erat dan Anak Pemohon telah hamil 14 (empat belas) minggu;
- Bahwa Anak Pemohon dan **CALON SUAMI** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **CALON SUAMI** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **ANAK** sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **ANAK** sangat dekat dan **ANAK** telah hamil 14 (empat belas) minggu karena hubungan tersebut;
- Bahwa ia dan **ANAK** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **ANAK**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 5 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **ANAK** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 20 tahun 7 bulan 10 hari dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Sopir di usaha depot air minum dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka adalah ayah kandung dan ibu kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **ANAK** sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **ANAK** sangat dekat dan **ANAK** telah hamil 14 (empat belas) minggu karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **ANAK** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejaka yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Sopir di usaha depot air minum;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Halaman 6 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK: - tertanggal 18 Juni 2024 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Nomor: - Tanggal 18 Juni 2024 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK**, NIK: - tertanggal 20 Juni 2024 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor: - Tanggal 10 Mei 2011 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK** dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 -, Kabupaten Minahasa, tertanggal 08 Juni 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Minahasa, Nomor: - Tanggal 18 Desember 2008 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI**, NIK: - tertanggal 29 April 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **AYAH CALON SUAMI**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tomohon Nomor: -

Halaman 7 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 April 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*/en, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama **CALON SUAMI** yang dibuat oleh **CALON SUAMI** tertanggal tanggal 22 Juni 2024 dan diketahui oleh Imam Mesjid Baiturrahman Langowan, Kabupaten Minahasa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*/en, diberi kode P.9;

10. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Nikah kepada calon pengantin/wali **ANAK** dari KUA Langowan, Kabupaten Minahasa, nomor **B-79/kua 23.03/PW.01/VII/2024**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*/en, diberi kode P.10;

11. Asli Surat Keterangan atas nama **ANAK** (Anak Pemohon) dari UPT Puskesmas Wolaang, Kabupaten Minahasa Nomor: - Tanggal 1 Juli 2024, bermeterai cukup dan di-*nazege*/en, diberi kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan dari Hukum Tua (Kepala Desa) Amongena II, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Nomor: - tertanggal 2 Juli 2024, bermeterai cukup dan di-*nazege*/en, diberi kode P.12;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Usaha Kost, tempat kediaman di - Kota Tomohon di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah sepupu Calon Mempelai Pria;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **ANAK** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;

Halaman 8 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK** dengan **CALON SUAMI**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
  - Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
  - Bahwa **CALON SUAMI** bekerja sebagai Sopir di Depot Air Minum;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di - Kota Tomohon, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena berteman calon suami anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **ANAK** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
  - Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sangat dekat;
  - Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
  - Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK** dengan **CALON SUAMI**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 9 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejak;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **CALON SUAMI** telah bekerja sebagai Sopir di usaha depot air minum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 10 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tondano memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **ANAK**, usia 18 tahun 7 bulan 8 hari, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Langowan, Kabupaten Minahasa, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Sopir di depot air minum dengan penghasilan per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak 1 (satu) tahun dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 14 (empat belas) minggu, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** yang memiliki perbedaan usia 2 tahun 2 hari, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan anaknya yang bernama **ANAK**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti

Halaman 12 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti identitas Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **ANAK** lahir di Langowan pada tanggal 03 Desember 2005 adalah anak kandung kesatu dari **AYAH ANAK** dan **PEMOHON** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **ANAK** saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan 8 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **ANAK** dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Langowan, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **ANAK** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **ANAK** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **CALON SUAMI** lahir di Binceta pada tanggal 01 Desember 2003 adalah anak kandung kesatu dari **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto*

Halaman 13 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa **CALON SUAMI** saat ini telah berusia 20 tahun 7 bulan 10 hari;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas calon suami Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal calon suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas calon suami Anak Pemohon, selain agama, telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **AYAH CALON SUAMI**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal orang tua calon suami Anak Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan istri dan anaknya yang bernama **CALON SUAMI**, bertempat tinggal di Kota Tomohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa orang tua calon suami Anak Pemohon bertempat tinggal di Kota Tomohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama **CALON SUAMI** yang dibuat oleh **CALON SUAMI** dan diketahui oleh Imam Mesjid Baiturrahman Langowan adalah akta sepihak atau pengakuan sepihak isinya yang menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Juni 2024 **CALON SUAMI** menyatakan memeluk agama Islam dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan setelah memeluk agama Islam, namanya menjadi **CALON SUAMI**, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Halaman 14 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Nikah kepada calon pengantin/wali **ANAK** dari KUA Langowan, Kabupaten Minahasa, adalah akta autentik yang menjelaskan permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK** dengan **CALON SUAMI** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK** dengan **CALON SUAMI** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan atas nama **ANAK** dari Puskesmas Wolaang adalah akta sepihak atau pengakuan sepihak isinya yang menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan, anak yang bernama **ANAK** dalam keadaan hamil 13-14 Minggu, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Asli Surat Keterangan dari Hukum Tua (Kepala Desa) Amongena II, adalah akta di bawah tangan isinya yang menjelaskan **AYAH ANAK** telah berpisah sejak tahun 2015, bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil, oleh karenanya itu bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Halaman 15 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano;
- 2 **ANAK** lahir di Langowan pada tanggal 03 Desember 2005 adalah anak kandung kesatu dari **AYAH ANAK** dan **PEMOHON** yang berarti saat ini masih berusia 18 tahun 7 bulan 8 hari;

Halaman 16 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **ANAK** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4 Calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI**, lahir di Binceta pada tanggal 01 Desember 2003 adalah anak kandung kesatu dari **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI**, saat ini berusia 20 tahun 7 bulan 10 hari;
- 5 Status Anak Pemohon saat ini adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
- 6 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 7 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 8 Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- 9 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 14 (empat belas) minggu, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 10 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- 11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK** dengan **CALON SUAMI** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langowan menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK** dengan **CALON SUAMI** karena saat ini calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan hamil 14 (empat belas) minggu disebabkan hubungannya dengan **CALON SUAMI** dan keduanya telah yakin

Halaman 17 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Halaman 18 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan Anak Pemohon sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang

Halaman 19 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Pertimbangan Petitem Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo





Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1446 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tondano yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Tdo tanggal 04 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,  
Ttd

Hakim,  
ttd

Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp160.000,00</b>
( seratus enam puluh ribu rupiah )	